



Kebijakan Bea dan Cukai Menghadapi ASEAN Economic Community 2015

Seminar Nasional

Peluang dan Tantangan Profesi Ekspor dan Impor Dalam
Menghadapi Asean Economic Community (AEC) 2015

Jakarta, 22 Maret 2014

Mandat, Visi, dan Misi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)

UU No. 10/1995 jo. UU No. 17/2006

- Memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor
- Memungut bea keluar
- Mengawasi lalu lintas barang impor dan ekspor

UU No. 11/1995 jo. UU No. 39/2006

- Memungut cukai atas barang dengan sifat dan karakteristik tertentu
- Mengawasi distribusi barang kena cukai

VISI:

Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional

MISI:

- Mengamankan hak keuangan negara
- Memfasilitasi perdagangan
- Mendukung industri
- Melindungi masyarakat

DJBC telah melakukan berbagai upaya reformasi dalam mengemban mandat yang diberikan



1995
Reformasi UU
Kepabeanan
dan UU Cukai



2002
Reformasi
Kebijakan
Makro DJBC



2006
Percepatan
Reformasi
Kebijakan Makro
DJBC

Amandemen UU
Kepabeanan, dan
Identifikasi
Permasalahan
Reformasi yang
dituangkan dalam
Cetak Biru Kantor
Modern



2007
Reformasi Birokrasi
Kemenkeu (Penataan
Organisasi,
Penyempurnaan
Proses Bisnis,
Peningkatan Disiplin
dan Manajemen
SDM)

Amandemen UU
Cukai, dan
Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi
Kemenkeu di DJBC
dengan
pembentukan Kantor
Modern

Saat ini
Apakah
sudah
cukup?

Perkembangan ekonomi, perdagangan, dan kerjasama internasional menuntut adanya perubahan *mindset* DJBC

Pertumbuhan ekonomi nasional yang cukup tinggi
Ekspansi perdagangan internasional
Semakin bertambahnya kerjasama ekonomi dengan negara lain
Perkembangan ekonomi regional

Dari...

Menjadi...

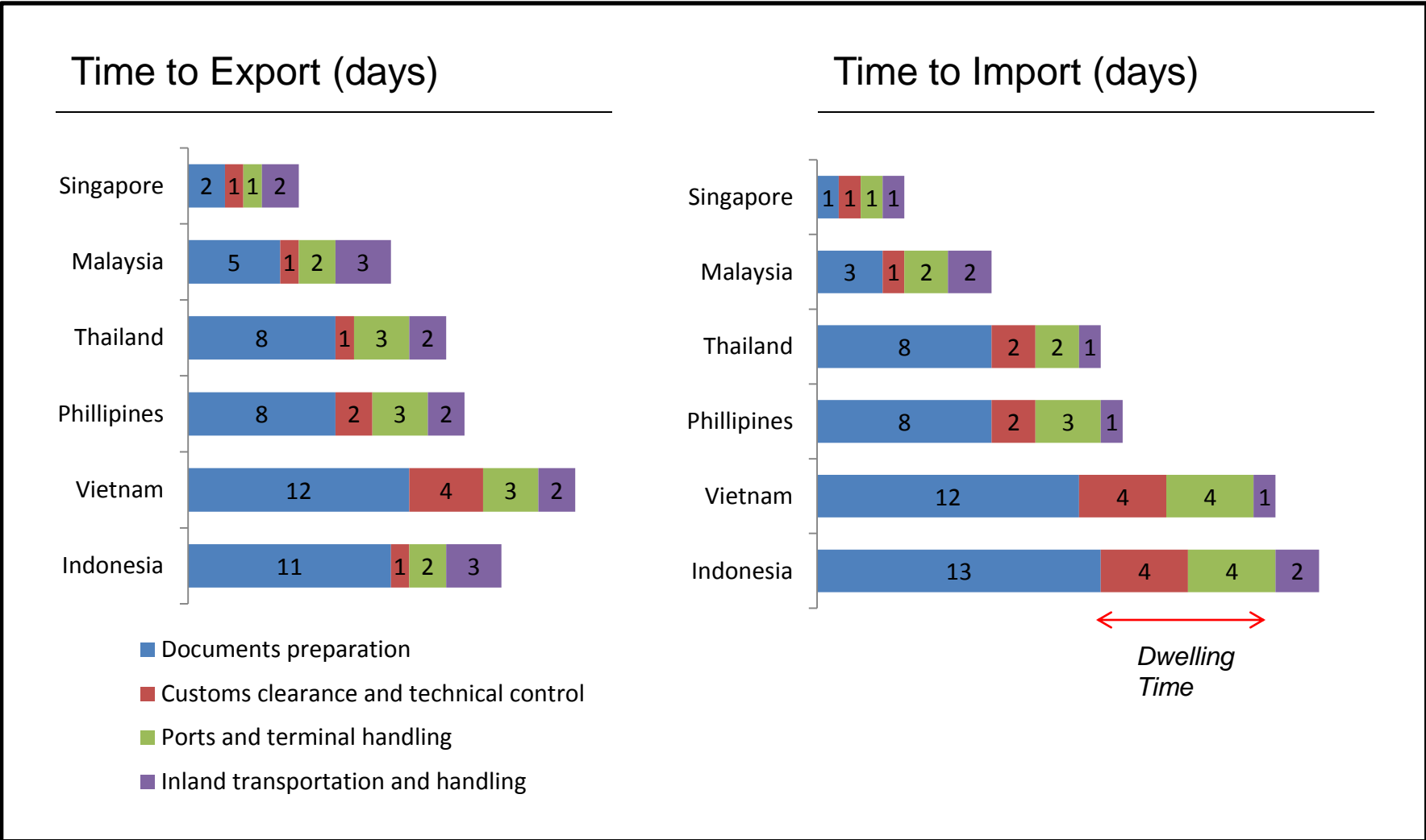
	Dari...	Menjadi...
VISI	Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional	Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia
MISI	<ul style="list-style-type: none">▪ Mengamankan hak keuangan negara▪ Memfasilitasi perdagangan▪ Mendukung industri▪ Melindungi masyarakat	<ul style="list-style-type: none">▪ Kami memfasilitasi perdagangan dan industri▪ Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan ilegal▪ Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai

Perubahan urutan pernyataan misi mencerminkan perubahan fokus DJBC yang selama ini lebih dominan pada mandat pemungutan penerimaan negara menuju peran fasilitasi perdagangan dan industri

Rencana cetak biru ASEAN Economic Community telah selaras dengan prioritas misi DJBC dalam memfasilitasi perdagangan dan industri

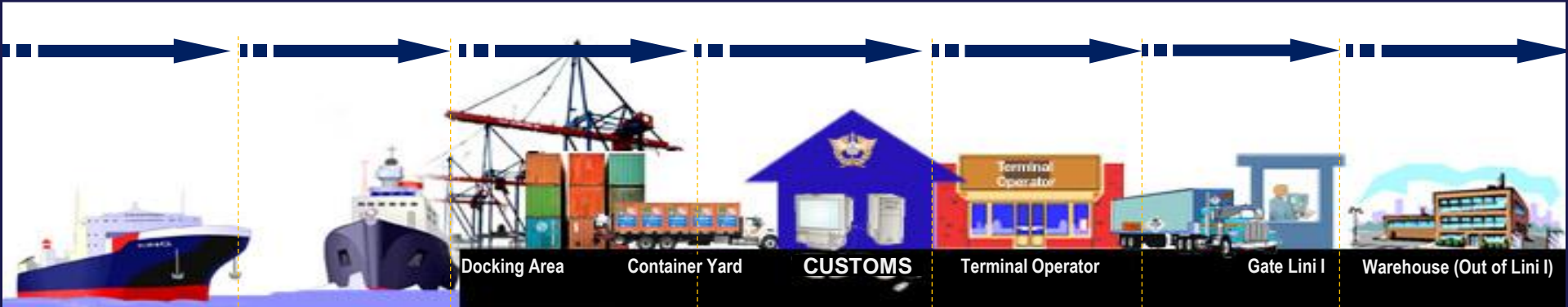


Waktu pengeluaran barang dari pelabuhan (dwelling time) untuk ekspor sangat kompetitif di ASEAN, sementara untuk impor perlu perbaikan



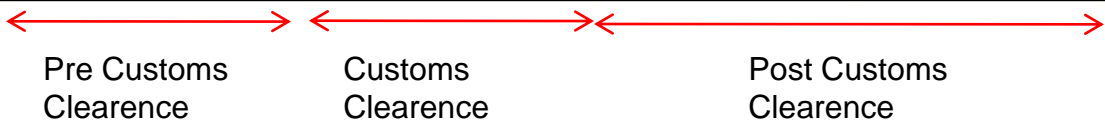
Sumber: Worldbank, <http://www.doingbusiness.org/data>

Jika dianalisa lebih lanjut, kontribusi tertinggi *dwelling time* impor terdapat pada tahap Pre Customs Clearance (1/2)



Laut/ Perairan Pelabuhan Pelabuhan/ Kawasan Pabean/ TPS Luar Pelbhn/Lok.Imp

Arrival at Port Limit	Docking-Unloading	Berthing-Stacking in CY	Customs Clearance	Container Handling → Handover	Gate-Out System	Warehouse/ Bonded/ CFS/ Factorage
1	2	3	4	5	6	7
Kedatangan Kapal di Perairan Pelabuhan, menunggu sandar di Dermaga	Kapal sandar di Dermaga, menunggu proses bongkar barang	Proses pembongkaran barang s/d penimbunan di CY (Container Yard)	Proses penyelesaian kewajiban pabean (Customs Clearance) s/d Customs Approval (SPPB)	Pengurusan barang/ container s/d pembayaran biaya penimbunan (SP2/ Tila)	Pengeluaran barang (container) dari kawasan pelabuhan (TPS/ TO)	Barang tiba di tempat Importir/ Pemilik barang (gudang/ pabrik/ KB/ GB)



58%

18%

25%

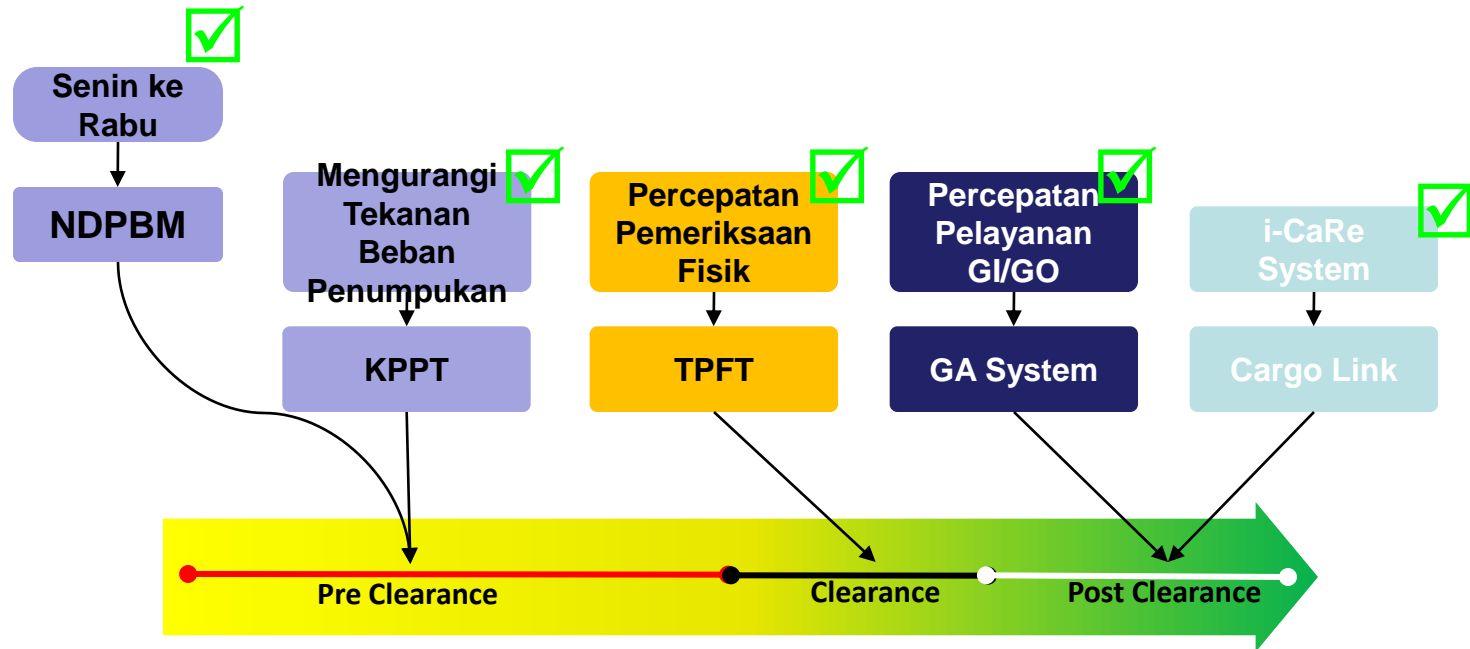
Sumber: Worldbank, Import container Dwell Time Study and Recommendations, 2011

Jika dianalisa lebih lanjut, kontribusi tertinggi *dwelling time* impor terdapat pada tahap Pre Customs Clearance (1/2)

Channels	Pre-clearance	Customs Clearance	Post-Clearance	Dwell Time	No. of Containers
Grand Total	58%	18%	25%	100%	100%
MITA Prioritas	4%	0%	13%	17%	20%
MITA Non Prioritas	5%	0%	2%	7%	8%
Hijau	33%	0%	14%	47%	49%
Kuning	4%	3%	2%	9%	8%
Merah	11%	14%	N/A	20%	16%

Sumber: Worldbank, Import container Dwell Time Study and Recommendations, 2011

Berbagai upaya untuk mengurangi *dwelling time* impor yang selama ini telah dilakukan akan dilanjutkan dengan piloting Kantor Modern 2.0 di Tanjung Priok dan koordinasi dengan stakeholder eksternal



1. Piloting Kantor Pelayanan Modern versi 2.0 pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok

Tujuan: Menurunkan *dwelling time* impor dari ~8 hari menjadi ~4.7 hari pada tahun 2014

2. Koordinasi Stakeholders Eksternal

Tujuan: Menginisiasi kerjasama yang efektif antar pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang relevan melalui *stakeholder lab* guna menurunkan *dwelling time* impor sebanyak 40-50% di tahun 2014

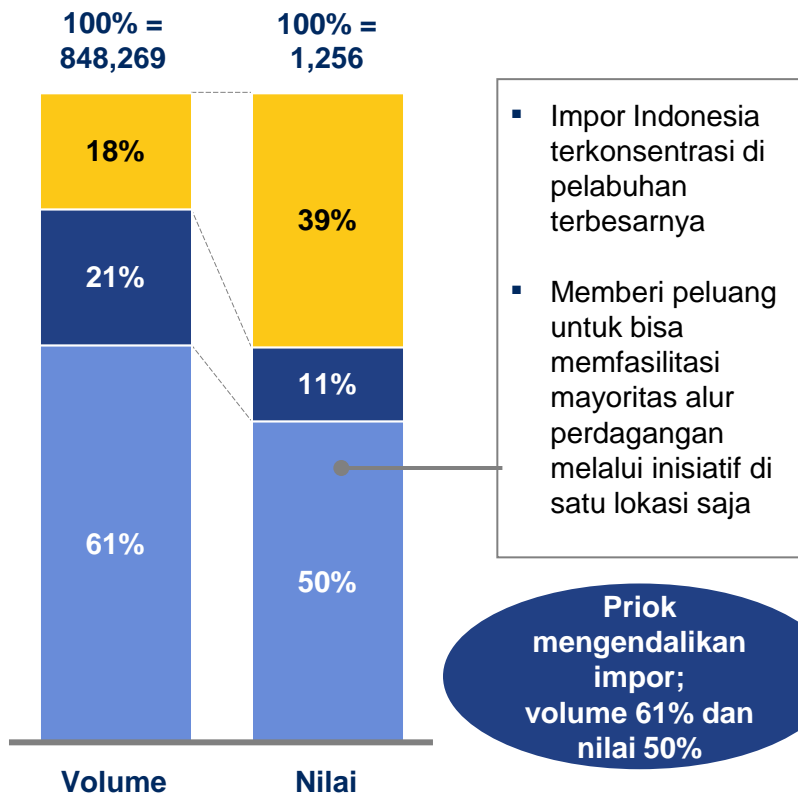
Keberhasilan pilot Tanjung Priok akan memfasilitasi impor internasional dan menjadi contoh kasus perubahan yang menarik perhatian

Tanjung Priok mengendalikan mayoritas kegiatan impor...

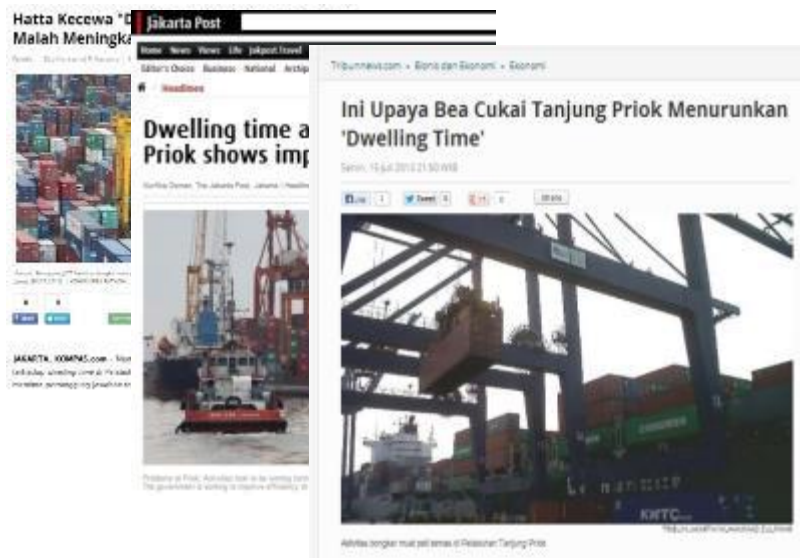
Volume dan nilai impor¹

Kontainer, Triliun Rp

■ Tanjung Priok ■ Tanjung Perak ■ Lain



... dan kinerjanya mendapat perhatian besar dari media dan juga publik



"Lamanya dwelling time di pelabuhan (Tanjung Priok) menyebabkan tingginya biaya bisnis yang membebani pemain bisnis dan lebih lagi, dapat mengganggu kegiatan perdagangan internasional"

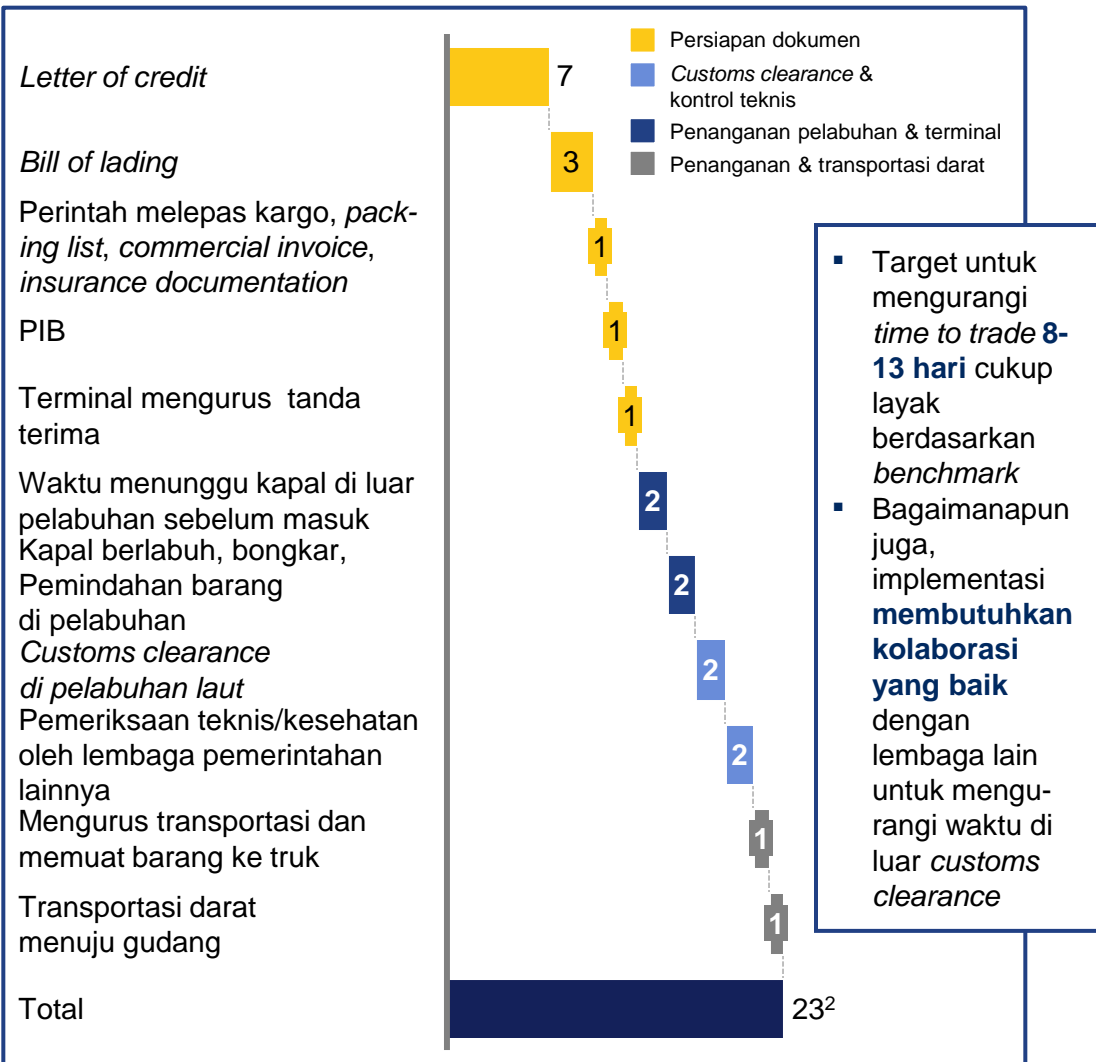
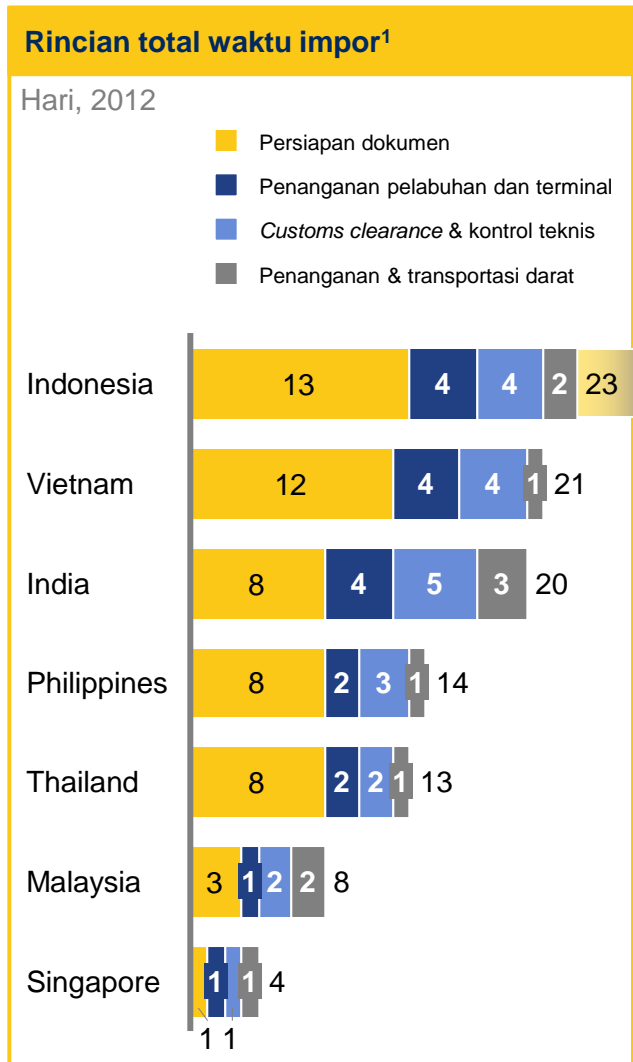
– Sofjan Wanandi, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Jakarta Post, Juli 23, 2013

"Saya sangat, sangat kecewa dengan naiknya dwelling time Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam rapat koordinasi, saya khusus meminta itu diturunkan menjadi 4 hari selama 3 minggu. Kenyataannya malah sebaliknya sekarang"

– Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Perekonomian Kompas, Juli 4, 2013

¹ Volume impor pada Jan – Apr 2013; Nilai impor pada Jan – Des 2012

Waktu impor saat ini mencapai 23 hari berdasarkan World Bank, perlu bekerjasama dengan stakeholder lain untuk mengurangi waktu impor



¹ Data dan ketetapan dari Bank Dunia

² Perlu mempertimbangkan bahwa ukuran sampel yang digunakan relatif kecil, sehingga hanya digunakan sebagai indikator

Lebih dari 10 instansi/lembaga pemerintah terlibat dalam proses impor

Proses impor melibatkan lebih dari 10 instansi pemerintah melalui penerbitan ijin / rekomendasi impor

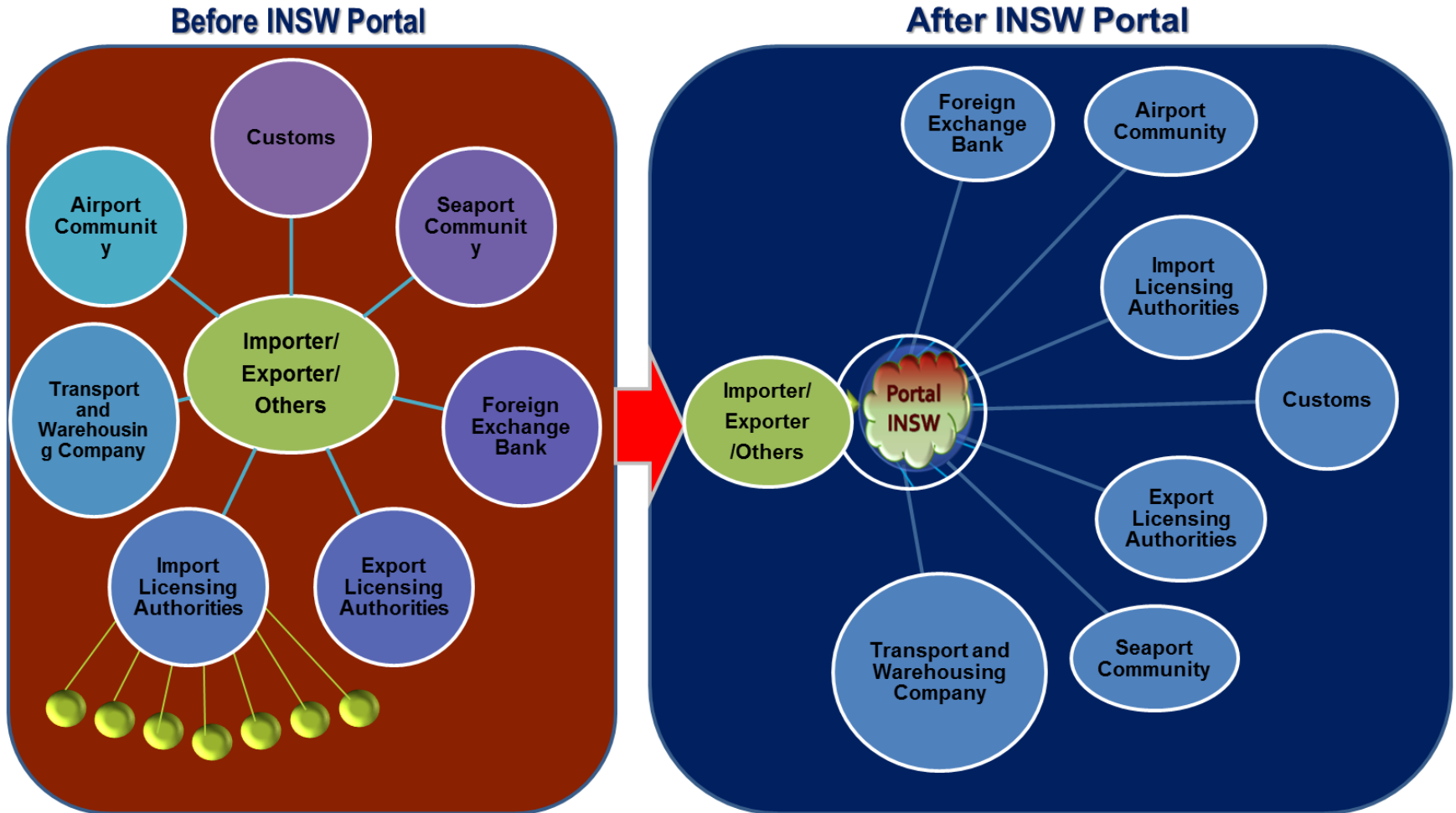
National Single Window (NSW) adalah langkah pertama menuju kolaborasi yang lebih erat, tetapi masih berpotensi untuk terus dikembangkan

No	Government Agencies	Imp-Exp.Licensing	Recommendation
1	Ministry of Trade	✓	
2	Fishery Quarantine	✓	
3	Animal Quarantine *	✓	
4	Plantation (Quarantine *	✓	
5	Food & Drugs Control	✓	
6	Ministry of Industry		✓
7	Ministry of Energy	✓	✓
8	Nuclear Control NA	✓	✓
9	Ministry of Forestry	✓	
10	DG of Post & Teleco	✓	
11	Ministry of Agriculture	✓	✓
12	Ministry of Health	✓	
13	National Police	✓	
14	Ministry of Environment	✓	✓
15	Ministry of Defense		✓
16	Ministry of Transport.	✓	
17	Central Bank (BI)		✓
18	Customs (DGCE)	--	--



Visual illustration: Before and After INSW Portal

→ will be extended to ASW



Implementasi portal INSW memberikan berbagai kemudahan dan keunggulan kepada pihak-pihak yang terkait

Main Goals

- ☑ To accelerate the speed of service related to export-import
- ☑ To minimize time and cost needed in conducting export-Import activities
- ☑ To improve validity and accuracy of data/information related to export-Import
- ☑ To build a control instrument for all services related to export-Import
- ☑ Good-Governance → to realize transparent, accountable, real-time public services from all institutions and apply the check & balance and data reconciliation approach

Benefits for Government

- *To facilitate the accelerated flow of services in customs release and clearance of cargoes*
- *To provide a low cost, user friendly, convenient, secured and reliable service system*
- *To create a more reliable risk management system*
- *To improve validity and accuracy of data, to reduce level of data redundancy and duplication*
- *To facilitate law enforcement related to export import activities*
- *To increase protection on national interest against risk from export-import*
- *To optimize government revenue from international trade/export-import*
- *To support the application of Good Public Governance principles in export-Import services*

Benefits for the Business Sector

- To give certainty in context of cost and time required to provision or service related to export-import
- To increase the level of competitiveness of national products in the global market
- To expand market access and factors of production
- To increase effectiveness and efficiency in utilization and allocation of resources
- To boost growth and development of entrepreneurship
- To support the application of Good Corporate Governance principles in export-import clearance

Selain itu, ekspektasi publik tinggi terhadap peran DJBC dalam menurunkan dwelling time – perlu mengklarifikasi hal ini sekaligus secara proaktif menggerakkan kerja sama dengan instansi lain

DJBC sebelumnya menekankan bahwa proses yang memakan waktu bukanlah tanggungjawabnya...

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

RATA-RATA WAKTU SEJAK SPJM
(Rincian *customs clearance*)

Proses	Januari	Pebruari	Maret
Waktu SPJM s.d Kesiapan barang	8,21	8,90	6,41
Waktu Kesiapan Barang s.d Penunjukan Pemeriksa	0,04 (57,6 mnt)	0,012 (17,28 mnt)	0,04 (57,6 mnt)
Waktu Pemeriksaan (SLA 3-4 jam)	0,06 (1,44 jam)	0,05 (1,2 jam)	0,06 (1,44 jam)
Waktu Rekam	0,02 (28,8 mnt)	0,00489 (7,04 mnt)	0,003 (4,32 mnt)
Waktu Selesai Pemeriksaan s.d Rekam LHP (SLA 1 jam)	0,03 (39 mnt)	0,0605 (1,45 jam)	0,03 (43,2 mnt)
Waktu Rekam LHP s.d PFPD	2,97	2,92	2,89
Waktu Penelitian PFPD (SLA 3 hari)	0,46 (11,04 jam)	0,58 (13,92 jam)	0,42 (10,08 jam)
Waktu selesai Penelitian PFPD s.d SPPB	0,21 (5,04 jam)	0,24 (5,76 jam)	0,48 (11,52 jam)
		13,11	10,52

Laporan terdahulu menunjukkan peran kecil DJBC dalam total *dwelling time*

DIREKTORAT

...namun ekspektasi telah berubah, sehingga perlu untuk mempertimbangkan peran proaktif

“Hatta akan meminta laporan dari semua pihak terkait, mulai dari DJBC, PT Pelindo II (Persero), Otoritas Pelabuhan, pengelola terminal JICT, dan Penimbunan Pabean Koja serta pengguna jasa pelabuhan untuk merumuskan solusi secepatnya”

Chatib secara khusus meminta **Wamen Kemenkeu, Mahendra Siregar untuk berkantor di Tanjung Priok**. “Untuk pelabuhan, saya sudah meminta Pak Mahendra untuk bertugas di Tanjung Priok 2 hari seminggu sehingga beliau bisa mengecek pelaksanaan pelayanan yang sudah sampai pukul 23.00.”

Di tempat yang berbeda, **Kadin Indonesia mendorong integrasi semua komponen di pelabuhan Tanjung Priok** untuk mengurangi *dwelling time* menjadi 3 hari



Terima Kasih